

Prospek Penerapan Konsep *Plea Bargaining* Dalam Upaya
Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

(Tinjauan Urgensi Perubahan Hukum Acara Pidana)

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Derajat Gelar S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

NAILI ARIYANI
201710380211001

DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2020

PROSPEK PENERAPAN KONSEP *PLEA BARGAINING* DALAM UPAYA PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

(Tinjauan Urgensi Perubahan Hukum Acara Pidana)

Diajukan oleh :

**NAILI ARIYANI
201710380211001**

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, Selasa/ 17 November 2020

Pembimbing Utama


Mokh. Najih, S.H., M.Hum, Ph.D

Pembimbing Pendamping


Dr. Tongat, S.H., M.Hum

Direktur
Program Pascasarjana


Prof. Akhsanul In'am, Ph.D

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Mokh. Najih, S.H., M.Hum, Ph.D

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

NAILI ARIYANI

20170380211001

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Sabtu/ 24 Oktober 2020
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Mokh. Najih, S.H.,M.Hum,Ph.D

Sekretaris : Dr. Tongat, S.H.,M.Hum

Penguji I : Dr. Herwastoeti, S.H.,M.Si

Penguji II : Dr. Haris, S.H.,M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **NAILI ARIYANI**
NIM : **201710380211001**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **PROSPEK PENERAPAN KONSEP PLEA BARGAINING DALAM UPAYA PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA (Tinjauan Urgensi Perubahan Hukum Acara Pidana)** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **plagiasi**, saya bersedia Tesis ini **digugurkan** dan **gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan** serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **Hak bebas royalty non eksklusif**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 17 November 2020

Yang menyatakan,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Naili Ariyani'.

NAILI ARIYANI

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Segenap puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA kepada seluruh makhluk di muka bumi ini tanpa batas. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah pula kepada junjungan Nabi Muhammad SAW bersama para keluarga dan sahabat.

Dengan ridha Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kelapangan, kesabaran, serta kekuatan lahir dan batin kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum (Tesis) ini dengan baik dan lancar, mulai dari pengajuan tema dan judul, proses penelitian, hingga ujian akhir.

Disamping rasa syukur yang mendalam kehadirat Allah SWT, penulis juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan do'a, dorongan moril, semangat, motivasi, serta bimbingan akademik, yang dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Mokh. Najih, SH.,M.Hum.,Ph.D, selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan Pembimbing I (satu) penulisan hukum ini.
4. Bapak Dr. Tongat, SH.,M.Hum., selaku Pembimbing II (dua) penulisan hukum ini.
5. Suami, Kakanda Heru Budiana, anak-anak tersayang, Fathiya Sahda Khairunnisa & Radika Fauzan Hakim, yang telah begitu sabar mendampingi dan memberikan dukungan semangat untuk penulis.
6. Orang Tua tersayang, Ayahnda Eddy Rusdy dan Ibunda Halimiyah, yang tidak pernah berhenti berdo'a untuk kelancaran setiap langkah penulis.

7. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Malang Raya, beserta segenap pengurus.
8. Rekan Fakhrizal Arief Firmansa, SH., beserta segenap *supporting partner* Kantor Hukum Naili Ariyani, SH & Rekan.
9. Sdri Ratri Novita Erdianti, SH.,MH., sahabat tersayang, yang banyak memberikan sumbangsih pemikiran, saran, dan kritik membangun, untuk penulis selama penyelesaian pendidikan pasca sarjana.

Segenap do'a tulus dipanjatkan penulis, semoga Allah SWT mencatat bantuan dan dukungan pihak-pihak tersebut diatas, sebagai amal dan kebaikan yang berlimpah pahala dan berkah.

Akhir kata, besar harapan penulis semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis, bagi dunia peradilan, maupun bagi masyarakat ada umumnya.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Malang, 18 Nopember 2020

Naili Ariyani



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	i
Susunan Dewan Penguji.....	ii
Surat Pernyataan.....	iii
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	v
Abstraksi.....	vi
Abstract.....	vii
Latar Belakang.....	5
Rumusan Masalah.....	12
Tujuan Penelitian.....	12
Originalitas Penelitian.....	12
Metode Penulisan.....	14
Kerangka Teori.....	18
Hasil Penelitian.....	40
Kesimpulan dan Saran	50
Daftar Pustaka	52

Prospek Penerapan Konsep *Plea Bargaining* Dalam Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

(Tinjauan Urgensi Perubahan Hukum Acara Pidana)

Naili Ariyani

Naili.hk@gmail.com

Pembimbing : Mokh. Najih, SH.,M.Hum.,Ph,D (NIDN. 0017056501)

Dr. Tongat, SH.,MH.,M.Hum (NIDN. 0013016701)

Abstrak

Untuk memenuhi tuntutan membangun peradilan yang efektif, penerapan konsep *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Sistem hukum di Indonesia memiliki peluang untuk mengadopsi konsep *Plea Bargaining* ke dalam sistem peradilan pidana, hanya saja diperlukan penyesuaian antara konsep *Plea bargaining* dengan sistem Peradilan Pidana yang berlaku di Indonesia yang menganut sistem civil law yang memberlakukan batas minimum pembuktian. Amerika Serikat dan Inggris adalah Negara yang menggunakan sistem hukum *common law*, berberda dengan Indonesia yang menggunakan sistem hukum *civil law*, keduanya menggunakan model yang menjadi dasar sistem peradilan yang sama, yaitu *due process model*, sehingga, dengan sistem peradilan yang lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi individu secara adil dan sesuai dengan standar konstitusi, maka di Amerika Serikat diterapkan *Plea Bargaining System*. Sistem ini selain bertujuan untuk mempercepat proses peradilan pidana, juga untuk memberikan penghormatan atas pengakuan bersalah dari tersangka/terdakwa. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai prospek pemberlakuan konsep *Plea Bargaining* karena melihat adanya peluang diterapkannya konsep tersebut pada sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Gagasan awal yang mendasari pemikiran penulis ini adalah terdapat kelemahan pada sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya pada prosedur Penyidikan dan Penuntutan. Disamping itu, tidak diakui eksistensi keterangan atau pengakuan terdakwa sebagai alat bukti yang dapat berdiri sendiri, semakin membuat penyelesaian perkara Pidana di Indonesia memerlukan waktu yang lama, sehingga membuka peluang terjadinya permasalahan lain yaitu penumpukan perkara pidana yang antri menunggu untuk diselesaikan. Permasalahan-permasalahan inilah yang membuka peluang diterapkannya konsep *Plea Bargaining* di Indonesia.

Kata kunci: *Plea Bargaining*, negosiasi, pengakuan, Terdakwa

Prospects for Application of the Plea Bargaining Concept in Efforts to
Reform the Criminal Justice System in Indonesia
(Review of the Urgency of Change in a Criminal Procedure Law)

Naili Ariyani

Naili.hk@gmail.com

Thesis Advisor: Mokh. Najih, SH.,M.Hum.,Ph,D (NIDN. 0017056501)

Dr. Tongat, SH.,MH.,M.Hum (NIDN. 0013016701)

Abstract

To fulfill the requirements for building an effective judiciary, the application of the Plea Bargaining concept to the criminal justice system in Indonesia is an inevitable need. The legal system in Indonesia has the opportunity to present the concept of the Bergaining Petition into the criminal justice system, it is only needed based on the concept of petition negotiation with the Indonesian Criminal Justice system which adopts a civil law system that imposes a minimum limit of proof. The United States and the United Kingdom are countries that use a common law legal system, in contrast to Indonesia which uses a civil law legal system, utilizing the model that is the basis of the same justice system, namely the due process model, so that , with a judicial system that prioritizes protection of human rights individuals fairly and in accordance with the standard constitution, the United States applies the Plea Bergaining System. This system aims to accelerate the criminal justice process, as well as to respect the recognition of the suspect / defendant. The author is interested in conducting further research on the prospects for the application of the Petition Negotiation concept because he sees the opportunity to apply the concept to the Criminal Justice system in Indonesia. The initial idea that underlies this author's opinion is the weakness of the criminal justice system in Indonesia, especially in the investigation and prosecution procedures. In addition, he did not admit that the existence of a letter or the defendant's confession as independent evidence, made the settlement of criminal cases in Indonesia take a long time, thus opening up other problems, namely the accumulation of criminal cases waiting to be binding . These problems open up opportunities for the application of the Plea Bargaining concept in Indonesia.

Keywords: Plea Bargaining, negotiation, confession, Defendant

A. LATAR BELAKANG

Sistem Peradilan yang adil (*fair trial*) merupakan salah satu indikator terbangunnya masyarakat dan sistem hukum yang adil. Hak atas perlakuan yang adil dan tidak memihak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak konstitusional warga negara. Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Bab XA tentang HAM, dalam pasal 28 D ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Ketentuan dasar mengenai hak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak ini kemudian diturunkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana, baik yang berisi ketentuan hukum materiil, maupun hukum formil. Berbagai instrumen internasional juga diratifikasi untuk menyesuaikan perkembangan hukum dan HAM di level internasional. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil, warga negara tidak terpenuhi haknya di hadapan hukum, sebagaimana telah ditetapkan dalam konstitusi.

Dalam norma yang lebih khusus, pemenuhan hak warga negara atas peradilan yang adil tertuang dalam asas-asas yang berlaku pada sistem Peradilan Pidana di Indonesia, yang secara normatif termaktub dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas-asas yang berlaku dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia, bertujuan untuk melindungi hak warga negara sebagai bagian dari sistem hukum dan peradilan.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan salah satu wujud upaya negara dalam merancang dan menciptakan *criminal justice system* model, dengan meletakkan KUHP sebagai dasar hukum utama dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana secara terpadu, disamping ketentuan-ketentuan khusus dalam undang-undang lain yang melengkapi KUHP.

Sebagai dasar hukum utama penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia, KUHP mengandung keseluruhan aturan mengenai mekanisme penyelesaian perkara pidana mulai dari tingkat penyidikan hingga pelaksanaan putusan oleh Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu, KUHP mengatur pula

mengenai kewenangan lembaga-lembaga penegak hukum yang merupakan sub sistem dalam sistem peradilan pidana, serta mengatur pula mengenai hak-hak warga negara, baik dalam kedudukan sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana.

Sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, salah satu tujuan diterbitkannya KUHAP adalah untuk memberikan perlindungan atas harkat dan martabat manusia. Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP telah dirumuskan mengenai tujuan Hukum Acara Pidana yakni¹:

“Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Jika menilik rumusan tersebut di atas maka dapat dirinci tujuan Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

1. Mencari suatu kebenaran materiil yaitu kebenaran hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan Hukum Acara Pidana secara tepat dan jujur.
2. Menentukan subyek hukum berdasarkan alat bukti yang sah, hingga dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana.
3. Menggariskan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan, agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan orang yang didakwa itu.

Tujuan Hukum Acara Pidana ini sejalan dengan fungsi hukum menurut van Bemmelen yaitu mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh

¹ Lihat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor: M.01PW.07.03, Th. 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

hakim, dan pelaksanaan keputusan.²

Salah satu upaya yang harus dilaksanakan agar tujuan Hukum Acara Pidana sebagaimana tersebut di atas tercapai, pelaksanaan dan penerapan KUHAP harus berpedoman pada asas-asas dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan sebagai pegangan dan rambu dalam implementasi di lapangan. Di antara asas-asas tersebut yaitu: asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), asas perintah tertulis dari yang berwenang atas segala tindakan dan upaya paksa, serta asas peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (*contante justitie*), yang akan menjadi pembahasan utama dalam penulisan ilmiah ini.

Pemenuhan hak asasi warga negara bukan hanya sebatas menyelenggarakan peradilan dengan baik, benar dan adil (*due process of law*), tapi lebih dari itu, ada kebutuhan untuk merancang dan menyelenggarakan sistem peradilan yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, kultur masyarakat yang terus berkembang sangat pesat. Di antara kebutuhan tersebut adalah bagaimana merancang sistem peradilan yang efisien dan efektif, berkeadilan, dan mampu menjamin kepastian hukum bagi warga negara. Dalam konteks ini, asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dalam implementasi di lapangan ternyata tidak dapat terlaksana dengan semestinya karena tidak didukung oleh sistem peradilan yang sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, & budaya masyarakat.

Dalam praktek penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia saat ini, kenyataan yang dihadapi adalah banyaknya perkara-perkara pidana yang sebenarnya “tidak layak” untuk diajukan ke pengadilan, dikarenakan nilai kerugian yang terlalu kecil, atau menyangkut persoalan-persoalan sepele (*trivial case*), ataupun pelaku-pelaku yang seharusnya mendapatkan perlakuan khusus (*younger and older offender*), yang sebenarnya perlu dicarikan jalan lain penyelesaian, selain melalui jalur pengadilan.³ Ditambah lagi peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat di bidang hukum, termasuk dalam dalam

² Lilik Mulyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. CV. Mandar Maju, Bandung, 1999

³ Chairul Huda, *Penerapan Mekanisme Small Claim Court*, Dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana), diakses pada www.bphn.go.id pada 19 Oktober 2019

ini kesadaran untuk memperjuangkan hak-haknya di hadapan siding pengadilan, prosedur dan mekanisme yang ada dirasakan tidak efisien dan tidak efektif lagi.

Melengkapi fakta di atas, berdasarkan data *world Justice Project Rule of Law*, Indonesia pada tahun 2015, hanya menempati urutan ke – 52 dari 102 dalam hal index Negara hukum (*rule of law index*), dengan point 0,52 dari 1, berada di bawah Filipina, Malaysia, dan Singapura. Dalam peradilan pidana, Indonesia memiliki point 0.44 untuk investigasi yang efektif (*effective investigation*), 0,48 untuk penyelesaian perkara yang efektif dan tepat waktu (*timely and effective adjudication*), 0,13 untuk sistem koreksi yang efektif (*effective correction system*), dan mendapatkan point 0,35 untuk proses hukum yang memperhatikan undang-undang dan hak yang dituduh (*due process of law*)⁴. Data index ini efektifitas penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia masih sangat rendah.

Data index sebagaimana diuraikan diatas, sesuai dengan data yang memperlihatkan tren semakin meningkatnya jumlah perkara pidana yang masuk ke Mahkamah Agung dari tahun ke tahun. Data yang dirilis Mahkamah Agung, tahun 2016 jumlah perkara yang ditangani Mahkamah Agung berjumlah 4.735 perkara, meningkat di tahun 2018 berjumlah 5.035 Perkara.⁵ Jumlah perkara yang tidak sebanding dengan rasio jumlah Hakim Agung ini, apabila bisa ditekan maka akan berdampak positif pada optimalisasi proses penyelesaian perkara dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan yang salah satunya tergambar pada putusan hakim yang berkualitas.

Disamping persoalan kebutuhan merancang sistem peradilan pidana yang efektif, perkembangan pesat kondisi sosial kemasyarakatan, memunculkan fenomena kebutuhan alternatif penyelesaian perkara pidana selain yang selama ini diatur di dalam KUHAP. Kebutuhan tersebut sesungguhnya telah ditangkap oleh Negara dengan menerbitkan peraturan-peraturan dibawah KUHAP, misalnya

⁴ LBH Jakarta dan MaPPI FH UI, Prapenuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, Puluhan Ribu Perkara Hilang, Penelitian Pelaksanaan Mekanisme Prapenuntutan Di Indonesia Sepanjang Tahun 2012 – 2014, berdasarkan data yang diakses pada World Justice Project Rule Of Law Index, <http://data.worldjusticeproject.org/#/group/IDN>, diakses pada tanggal 19 Oktber 2019

⁵ Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, Statistik Data Perkara Mahkamah Agung, diakses pada leip.or.id/statistik-data-perkara-mahkamah-agung/, pada tanggal 19 Oktober 2019

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁶, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,⁷ serta dalam aturan yang lebih teknis, telah diterbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.⁸

Peraturan-peraturan tersebut di atas, dalam perspektif asas KUHAP, banyak terdapat pertentangan. Namun demikian perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang didorong oleh perkembangan diberbagai aspek kemasyarakatan sudah tidak dapat lagi dibendung, sehingga perlu aturan hukum yang progresif mengikuti perkembangan tersebut. Permasalahan mendesak yang harus segera ditemukan jalan keluar adalah negara tidak boleh terus membiarkan carut marut sistem Peradilan Pidana yang disebabkan karena banyaknya peraturan-peraturan di bawah KUHAP yang bertentangan dengan asas-asas fundamental KUHAP. Kebutuhan untuk merevisi KUHAP menjadi tidak dapat dihindari untuk menyelaraskan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Di dalam penjelasan umum Rancangan KUHAP dikemukakan sejumlah indikator yang menunjukkan KUHAP sudah ketinggalan zaman. Pertama, KUHAP masih belum mampu memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, terutama dalam praktik penanganan perkara tindak pidana yang menjadi tugas para penegak hukum untuk menyelesaikan perkaranya secara baik dan adil. Kedua, perkembangan hukum dan perubahan peta politik yang dibarengi dengan

⁶ Undang-undang ini menangkap fenomena banyaknya Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak, sementara KUHAP yang belum mengakomodir prosedur penyelesaian perkara Pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam Penjelasan Undang-Undang ini memandang perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

⁷ Peluang penanganan Perkara Pidana dengan mekanisme yang lebih cepat dan efektif, tertuang dalam konsep *Justice Collaborator* pada Pasal 10 A Undang-Undang ini, yang mengatur mengenai penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan oleh saksi yang sekaligus berkedudukan sebagai pelaku Tindak Pidana yang dilakukan secara bersama-sama.

⁸ Peraturan ini membuka pintu lebar bagi masuknya Konsep Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara Pidana di tingkat Penyidikan, dan memberikan alternatif penyelesaian Perkara Pidana dengan jalan musyawarah/perdamaian diantara pelaku dan korban, dengan batasan dan syarat-syarat tertentu.

perkembangan ekonomi, transportasi, dan teknologi yang global berpengaruh pula terhadap makna dan keberadaan substansi KUHAP.⁹

Salah satu alternatif upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan peradilan pidana adalah merancang sistem penyelesaian perkara pidana yang efektif, khususnya sistem pembuktian perkara pidana yang efektif, berkeadilan, dan berkepastian hukum. Sudah saatnya sistem peradilan pidana di Indonesia mengadopsi model *Plea Bargaining System* sebagaimana yang diterapkan dalam praktek peradilan pidana di negara-negara *common law*, khususnya Amerika. Perkembangan hukum saat ini, konsep *Plea Bargaining* tidak hanya diberlakukan di negara-negara *common law*, tapi juga sudah diadopsi dan diberlakukan di negara-negara *civil law*, seperti Jerman, Perancis, Rusia, Georgia, dan Belanda. Pengakuan bersalah secara sukarela dari terdakwa menjadi patokan bagi penuntut umum untuk menentukan ancaman pidana yang akan dilanjutkan di muka sidang, maka dengan adanya konsep ini, sebuah proses peradilan pidana yang seharusnya memerlukan proses yang cukup panjang, menjadi lebih efisien dan cepat.¹⁰

Hal yang menarik pada konsep *Plea Bargaining* adalah Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa akan bernegosiasi untuk mencari kesepakatan yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak, tentang jenis kejahatan yang akan didakwakan dan ancaman hukuman yang akan dituntut di muka persidangan kelak. Namun mekanisme tersebut bukan dalam kerangka tawar-menawar hukuman, tetapi lebih kepada tujuan untuk efisiensi dan efektifitas penegakan hukum. Model *Plea Bargaining* sangat relevan untuk diterapkan ada proses penyelesaian Pidana dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia, seiring dengan tuntutan efektifitas penyelesaian perkara pidana.

Untuk perkara pidana sederhana dengan pembuktian yang sederhana pula, dengan konteks ancaman pidana paling lama 7 tahun, KUHAP yang berlaku saat ini tidak memiliki cara khusus, seperti *transactie*, *diversion* dan *Plea Bargaining*

⁹Apri Listiyanto, Pembaharuan Sistem Hukum Acara Pidana, diakses pada https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/, tanggal 25 Oktober 2019

¹⁰ Aby Mulana, Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP Dan Perbandingannya Dengan Praktek *Plea Bargaining* Di Beberapa Negara, diakses dari journal.uinjkt.ac.id, pada 18 Juli 2019

(*Plea Guilt*) agar perkara dapat diselesaikan secara cepat. Padahal asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi prinsip yang tidak dapat dipisahkan dalam peradilan pidana.¹¹

Praktek *plea bargaining* menjadi pilihan yang tidak dapat dihindarkan, ketika peradilan pidana mengalami penumpukan perkara yang harus segera ditangani, sehingga penyelesaian dengan melakukan negosiasi untuk mendapat kesepakatan pengakuan dari terdakwa, perlu dilakukan untuk memangkas peradilan pidana yang seharusnya dilakukan dengan prosedur yang lengkap.

Masyarakat diuntungkan karena mekanisme ini akan menghemat biaya pemeriksaan di pengadilan, dimana terdakwa mengakui perbuatannya dan tetap akan mendapatkan hukuman. Meskipun hukuman yang diberikan rata-rata lebih sedikit dari apa yang akan diputus hakim jika melalui proses pengadilan konvensional, namun disisi lain mekanisme ini dapat memberikan efek terhadap proses peradilan pidana karena penuntut umum mempunyai waktu lebih banyak dan bisa menangani lebih banyak perkara.¹²

Secara prinsip, konsep *plea bargaining* bertujuan menciptakan sistem peradilan yang cepat dan efisien. Sistem peradilan terhindar dari penumpukan perkara yang menimbulkan potensi pemeriksaan perkara yang tidak optimal. Terdakwa yang mengakui kesalahan dapat memperoleh manfaat pengurangan hukuman, penuntut umum tidak lagi perlu mengemban beban pembuktian yang sulit, serta korban dan masyarakat dapat segera memperoleh keadilan melalui putusan pengadilan. Namun manfaat yang lebih penting dari persoalan efektifitas peradilan yang akan dicapai dengan memberlakukan konsep *plea bargaining*, adalah tersedianya alternatif penyelesaian perkara pidana yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk memilih penyelesaian dengan peluang mendapatkan keadilan yang sebesar-besarnya, dengan melibatkan seluruh *stake holder* salah satunya adalah peran Advokat yang tidak dapat dipisahkan sebagai salah satu *stake holder* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

¹¹ *Loc.cit*

¹² Carolyn E. Damarest, dikutip dalam Dimas Prasidi, *Plea Bargaining*, sebuah jalan permisif bagi keadilan, artikel, www.scholarship.law.berkeley.edu

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis melakukan Penelitian dengan judul **“Prospek Penerapan Konsep *Plea Bargaining* Dalam Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Tinjauan Urgensi Perubahan Hukum Acara Pidana)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dijawab dalam penulisan ilmiah Tesis ini adalah:

1. Bagaimana prospek penerapan konsep *Plea Bargaining* dalam upaya pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Peran Penasihat Hukum Agar Penerapan Metode *Plea Bargaining* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dapat Memenuhi Aspek Keadilan, Baik Bagi Pelaku Tindak Pidana Maupun Bagi Korban?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prospek penerapan konsep *Plea Bargaining* dalam upaya Pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Peran Penasihat Hukum Agar Penerapan Metode *Plea Bargaining* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dapat Memenuhi Aspek Keadilan, Baik Bagi Pelaku Tindak Pidana Maupun Bagi Korban.

D. ORIGINALITAS PENELITIAN

Untuk mengetahui originalitas/keaslian penelitian, penulis memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Selain digunakan sebagai referensi penelitian yang dilakukan peneliti, penelitian terdahulu berfungsi sebagai alat pembanding bagi peneliti untuk menilai perbedaan substansi penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sehingga hasil penelitian terdahulu dan penelitian penulis dapat menjadi sumber karya ilmiah yang saling melengkapi untuk perkembangan khasanah keilmuan. Berikut penulis paparkan penelitian terdahulu mengenai *Plea Bargaining System*, sebagai berikut:

1. Aby Maulana, Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP Dan Perbandingannya Dengan Praktek *Plea Bargaining* Di Beberapa Negara, yang dipublikasikan pada media Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah mengenai Bagaimana konsep jalur khusus dalam RUU KUHAP dan Bagaimana perkembangan praktek dan teori *Plea Bargaining* yang diterapkan di berbagai Negara.
2. Yunizar Wahyu Tristanto, Tinjauan Yuridis Penerapan *Plea Bergaining* Untuk Meningkatkan Efisiensi Peradilan Di Indonesia, yang dipublikasikan pada media Jurnal Ahkam, Volume 6, Nomer 2, IAIN Tulungagung. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah mengenai Perlunya Peradilan Indonesia menerapkan sistem *Plea Bargaining* untuk menjadi solusi bagi penanganan perkara pidana sehingga menjadi efektif dan efisien.
3. Ruchoyah, Urgensi *Plea Bargaining System* Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, yang dipublikasikan pada media Skripsi UMM. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah Bagaimana konsep *Plea Bargaining System* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Amerika Serikat dan Bagaimana Urgensi *Plea Bargaining System* Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.
4. Supriyanta, Doktrin *Precedent* dan *Plea Bargaining System*, yang dipublikasikan pada media Jurnal Wacana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi. Penelitian ini mengangkat Perbandingan Doktrin *Precedent* dan *Plea Bargaining System* yang berlaku di Negara yang menganut sistem hukum *common Law*.
5. Devi Lindia Rosdiana, Pengaturan Pengakuan Bersalah Melalui Jalur Khusus Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana, yang dipublikasikan pada media Jurnal Wajah Hukum, Universitas Batanghari, Jambi. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah Perbandingan konsep *Plea Bargaining System* Pada Beberapa Negara.
6. Devi Lindia Rosdiana, Pengaturan Pengakuan Bersalah Melalui Jalur Khusus Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana, yang dipublikasikan pada media Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penelitian ini mengangkat rumusan masalah Bagaimana justifikasi/ pembenaran filosofis, yuridis & sosiologis pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam pembaharuan hukum acara pidana, Bagaimana konstruksi pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam pembaharuan hukum acara pidana dan Bagaimana kelemahan & kelebihan pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam pembaharuan hukum acara pidana.

7. Aby Maulana, Pengakuan Bersalah Terdakwa Dalam Perkembangan Pembuktian Peradilan Pidana Di Indonesia, yang dipublikasikan Varia Justicia, Universitas Muhammadiyah Magelang. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah Bagaimana kedudukan alat bukti “Pengakuan” dalam pembaharuan peradilan pidana dan Bagaimana pergeseran nilai pembuktian atas “Pengakuan Bersalah” Terdakwa dalam peradilan pidana.

E. METODE PENULISAN

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan.¹³ Berdasarkan ruang lingkup serta identifikasi masalah sebagaimana yang diuraikan Penulis, untuk mengkaji pokok permasalahan secara komprehensif, Peneliti menggunakan metode pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan teori atau konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.¹⁴ Menurut Soerjono Soekanto Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari jurnal-jurnal, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 112

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

ini.¹⁵ Dalam konteks Penelitian hukum normatif ini, Peneliti menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan “Penerapan Konsep *Plea Bargaining* Sebagai Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Tinjauan Urgensi Perubahan Hukum Acara Pidana)”

2. Bahan Hukum

Dalam proses Penelitian ini, Peneliti menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, menurut Mukhti Fajar dan Yulianto Ahmad, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, dalam hal ini meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudy, 2001, Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat), Rajawali pers, Jakarta, hlm: 13-14

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm:157

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
8. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang : Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor: M.01PW.07.03, Th. 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collabulator*)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder diperoleh dari studi pustaka berupa jurnal-jurnal, buku-buku, Artikel Ilmiah, rancangan peraturan perundang-undangan, Naskah Akademik, atau sumber-sumber lain baik cetak maupun online yang berhubungan dengan substansi penelitian, dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan Peneliti adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum Primer maupun bahan hukum sekunder, yang antara lain diperoleh dari kamus, ensiklopedia hukum, dll.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum

yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normative.¹⁷

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif isi (*content analysis*). Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah menelaah konsep *Plea Bargaining* yang berlaku di Negara-negara yang menganut sistem hukum *common Law*, selanjutnya melakukan penelaahan perkembangan Sistem Peradilan Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini yang dihubungkan dengan telaah mengenai kondisi sosial masyarakat. Sehingga pada akhirnya penulis akan menemukan rumusan-rumusan konsep dalam pembaharuan Sistem Peradilan Pidana yang relevan untuk diberlakukan di Indonesia. Bahan-bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif akan diuraikan secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antar bahan hukum yang digunakan. Selanjutnya bahan hukum tersebut diseleksi dan diolah, kemudian dinyatakan secara deskriptif, untuk mencari kesimpulan dan mencapai tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini.

Teknik analisa bahan hukum ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan Bambang Sunggono dalam teknik analisis Penelitian Hukum, yaitu:¹⁸

1. Perumusan masalah, yang merupakan pertanyaan mengenai obyek empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya;
2. Penyusunan kerangka berfikir dalam penulisan hipotesis, berupa argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling mempengaruhi permasalahan. Kerangka berfikir ini disusun secara rasional berdasarkan premis-premis ilmiah

¹⁷Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, Hlm. 392.

¹⁸ Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hlm: 47

yang telah teruji kebenarannya dengan memperhatikan faktor-faktor empiris yang relevan dengan permasalahan;

3. Perumusan hipotesis, merupakan jawaban sementara atau dugaan jawaban pertanyaan yang meterinya merupakan kesimpulan dari kerangka berfikir yang dikembangkan;
4. Pengujian Hipotesis, merupakan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis untuk memperlihatkan apakah fakta-fakta mendukung hipotesis atau tidak;
5. Penarikan kesimpulan, merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima;

F. KERANGKA TEORI

A. Konsep *Plea Bargaining*.

1. Definisi *Plea Bargaining*.

Plea Bargaining merupakan model penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan sebelum proses adjudikasi dilakukan di Pengadilan. Subjeknya adalah orang perorangan, bukan korporasi atau badan hukum.¹⁹ *Plea* dalam Bahasa Inggris diartikan Permohonan atau pembelaan, sedangkan *Bargaining* yang asal katanya dari *bargain* yang artinya tawar. Jadi *Plea Bargain* adalah penyelesaian perkara yang lebih cepat dan efisien dengan pengakuan bersalah dan tawaran pengurangan hukuman oleh Terdakwa/Tersangka.²⁰

Plea Bargaining dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai kesepakatan hasil negosiasi antara jaksa dengan terdakwa sehingga terdakwa yang mengakui kesalahannya akan mendapat hukuman lebih ringan atau didakwa dengan tindak pidana yang lebih ringan. Praktikanya, jaksa dan terdakwa 3 melakukan negosiasi atau tawar-menawar setidaknya dalam tiga bentuk, diantaranya: 1) charge bargaining (negosiasi pasal yang didakwakan), yaitu jaksa menawarkan untuk menurunkan jenis tindak pidana yang didakwakan; 2) fact bargaining (negosiasi fakta hukum), yaitu jaksa hanya akan menyampaikan

¹⁹ Febby Mutiara Nelson, 2020, *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika Cetaka Pertama, Jakarta. Hal.29

²⁰ Naskah Akademik RUU KUHP Versi 19 Desember 2012. Hal. 26

fakta-fakta yang meringankan terdakwa; dan 3) sentencing bargaining (negosiasi hukuman), yaitu negosiasi antara jaksa dengan terdakwa mengenai hukuman yang akan diterima terdakwa. Hukuman tersebut umumnya lebih ringan.²¹

Menurut Albert W. Alschuler yang dikutip Febby Mutiara bahwa *Plea Bargaining* adalah pertukaran hak yang ditawarkan penegak hukum ditukar dengan pengakuan bersalah terdakwa. Pertukaran ini bisa dalam bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan atau besar tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, tindak pidana yang didakwakan, atau berbagai kondisi lain.²² Pengakuan bersalah dari terdakwa dalam *Plea Bargaining* mendapatkan insentif. Pengakuan itu diberi makna, diberi tempat dalam sistem peradilan pidana, yakni adanya *guilty plea* itu menjadi faktor penting dalam pembicaraan/negosiasi dengan Jaksa agar dituntut lebih ringan, atau dalam mempercepat proses perkara pidana.²³

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *Plea Bargaining* adalah model penyelesaian perkara tindak pidana dalam tingkat proses penyidikan atau sebelum dilimpahkan perkara kepada Kejaksaan yang menitikberatkan pada adanya pengakuan bersalah dari Tersangka sebagai dasar adanya negosiasi tuntutan pidana.

2. Sejarah *Plea Bargaining* Negara Amerika Serikat dan Inggris.

Pelaksanaan *Plea Bargaining* memiliki akar yang kuat dalam sejarah hukum negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law* yang pada umumnya sistem peradilan pidananya menganut sistem Adversarial (*Akusator System*). Namun apabila ditelusuri perkembangan *Plea Bargaining* tidak hanya dalam dilaksanakan oleh negara common law saja namun sudah menyebar kepada negara-negara *civil law*. Bahwa pelaksanaan *plea bargaining* di common law system berbeda dengan *civil law system* oleh karenanya perlu dilakukan pembahasan berkenaan dengan pelaksanaan *plea bargaining* di beberapa negara. Di Amerika Serikat, *Plea Bargaining* dapat menyelesaikan perkara lebih banyak. Prosedur ini mendorong penegak hukum menyelesaikan 97 % perkara pidana

²¹ Black's Law Dictionary (9th ed. 2009), diakses melalui www.westlaw.com pada 2 Maret 2020

²² *Ibid.* Hal. 30

²³ *Ibid.* Hal. 33

pemerintah pusat dan 94 % perkara pidana pemerintah negara bagian. Plea Bargaining memiliki akar sejarah sejak abad ke 18 di Inggris dan abad ke-19 di Amerika. Di Amerika Serikat seluruh tindak pidana pada dasarnya dapat menggunakan proses Plea Bargaining, termasuk perkara berat namun ada beberapa negara bagian seperti di California dan Mississippi yang tidak memperbolehkan Plea Bargaining untuk perkara kekerasan seksual dan kekerasan fisik (misalnya pembunuhan, penganiayaan).²⁴

Di Amerika Serikat proses *Plea Bargaining* yaitu negosiasi dan tawar menawar antara penuntut umum (*Prosecuting Attorney*) dan terdakwa dapat dilakukan dengan tiga bentuk : (a) *Charge Bargaining* (Negosiasi pasal yang didakwakan); (b) *Fact Bargaining* (Negosiasi Fakta Hukum) dan (c) *Sentencing Bargaining* (Negosiasi hukuman).²⁵

Plea Bargaining Sistem diartikan sebagai sebuah pernyataan bersalah dari seorang tersangka maupun terdakwa. *Plea Bargaining* banyak dianut di negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law*. *Plea Bargaining* yang dikembangkan dalam sistem hukum common law ini telah mengilhami munculnya mediasi dalam praktik peradilan berdasarkan hukum pidana di Belanda dan Prancis, yang dikenal dengan “*transactie*”. *Plea Bargaining* dikategorikan sebagai sebuah upaya penyelesaian di luar sidang dan penggunaannya juga didasari oleh alasan-alasan tertentu. Bahkan dalam upaya pembaharuan hukum acara peradilan pidana di Indonesia, telah juga mengambil konsep dasar *plea bargaining* yang diadopsi dalam RUU KUHP dengan konsep “Jalur Khusus”. Bahwa dengan hadirnya konsep Jalur Khusus ini, juga menjadi perhatian apabila melihat dapat diberlakukannya kembali pengakuan bersalah terdakwa sebagai dasar hakim menjatuhkan putusan.²⁶

²⁴ Choky Risda Ramadhan et- all, *Konsep dan Penerapan Plea Bargaining di Beberapa Negara*, dalam I Made Agus Mahendra Iswara, 2017, *Penguatan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Pidana Melalui Plea Bargaining*, Jurnal Advokasi, Universitas Mahasaraswati, Denpasar. Hal. 29.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Nella Octaviany Siregar, 2019, *Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Jurnal Wajah Hukum, Volume 3, ISSN 2598-604X (online). Hal. 1

3. Perbandingan Konsep *Plea Bargaining* di beberapa Negara yang menganut paham *Anglo Saxon* dan *Eropa Kontinental*.

a. Negara yang menganut paham *Anglo Saxon*.

Negara yang menerapkan konsep *Plea Bargaining* di antaranya adalah negara-negara yang menganut paham *Anglo Saxon*, salah satunya berikut diuraikan :

1. Amerika Serikat.

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menganut paham *Plea Bargaining*. Sistem ini dianut di Amerika Serikat atas dasar pemikiran untuk mengefektifkan kinerja Hakim dan pengadilan dalam menangani banyaknya perkara yang masuk. MCS Spadden bahwa: “*penumpukan kasus di kota metropolitan (kota besar), tidak dapat dihindari, sehingga diperlukan sarana Plea Bargaining untuk mencegah keluarnya biaya dan waktu yang dikeluarkan lebih banyak*”.²⁷

Hal yang menarik dalam praktek peradilan pidana yang berlaku di negara *common law*, khususnya di Amerika Serikat ini, bahwa di kenal *Plea Bargaining* yang diketahui sebagai praktek penanganan perkara pidana, dimana antara pihak penuntut umum (jaksa) dan terdakwa atau penasihat hukum-nya telah terjadi perundingan/negosiasi tentang jenis kejahatan yang didakwakan dan ancaman hukuman yang akan dituntut dimuka persidangan nanti.

Pengakuan secara sukarela dari terdakwa menjadi patokan bagi penuntut umum untuk menentukan ancaman yang akan di ajukan dimuka sidang. Maka dengan adanya konsep ini, sebuah peradilan pidana yang seharusnya memerlukan waktu yang cukup panjang, menjadi lebih efisien dan cepat. Hakim dalam sistem ini hanya menjatuhkan pidana sebagaimana hasil perundingan yang telah disepakati oleh penuntut umum dan terdakwa.²⁸

²⁷Aby Maulana, 2014, *Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Ruu Kuhap Dan Perbandingan Dengan Praktek Plea Bargaining Di Beberapa Negara*, Jurnal Hukum Staatrecht Volume 1 No.1 oktober 2014. Hal 48.

²⁸ *Ibid.* Hal 43.

2. Inggris.

Praktek *plea bargaining* dalam system peradilan pidana di Inggris dan Wales telah membawa pengaruh yang besar, guna meningkatkan angka penyelesaian perkara dengan cepat dan efisien. Hal lainnya, adalah menghindari adanya case load yang seringkali mengganggu kinerja jaksa maupun hakim dalam memutus perkara.²⁹

Plea bargaining adalah salah satu yang terutama digunakan oleh jaksa untuk mengamankan kesaksian seseorang dituduh melakukan kejahatan terhadap persekongkolan yang telah didakwa dengan kejahatan yang lebih serius. Dalam banyak keadaan seorang individu akan dapat menegosiasikan hukuman dikurangi dengan mengaku bersalah atas tuduhan yang lebih ringan dalam pertukaran untuk menyetujui kondisi tertentu yang akan kerap beragam tergantung situasi kasus.³⁰ *Plea bargaining* dalam situasi ini akan sering terjadi ketika bukti terhadap seorang individu yang sangat kuat.³¹

“*Plea bargaining* dalam Magistrates Court hanya diperbolehkan sejauh bahwa jaksa dan terdakwa dapat setuju bahwa terdakwa akan mengaku bersalah atas beberapa tuduhan dan jaksa akan turun sisanya. Namun, meskipun hal ini tidak melakukan tawar-menawar pembelaan, dalam kasuskasus sebelum Crown Court, terdakwa dapat meminta indikasi dari hakim hukuman maksimal kemungkinan yang akan dikenakan harus terdakwa memutuskan untuk mengaku bersalah. Dalam kasus pelanggaran campuran di Inggris dan Wales, keputusan apakah akan menangani kasus di Magistrates Court atau Crown Court tidak dibuat oleh hakim sampai setelah permohonan telah dimasukkan. Seorang terdakwa dengan demikian tidak dapat mengaku bersalah dalam pertukaran untuk memiliki kasus ditangani di Magistrates Court (yang memiliki kekuatan hukuman yang lebih rendah)”³²

Oleh karena itu, *plea bargaining* dengan sistem hukum yang serupa dengan Amerika Serikat, dapat dikatakan tidak terlalu sulit dalam

²⁹ Nella Octaviany Siregar. *Op.cit.* Hal 5-6.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

penerapannya. Setidaknya terdapat dua (2) bentuk *plea bargaining* yang ada pada sistem peradilan pidana Inggris, yakni:

1. Tawar menawar pada dakwaan, jika terdakwa mengaku maka akan dikurangi dakwaan/tuduhan pada suatu kejahatan, dalam kebanyakan kasus, akan dipilih satu dari dua dakwaan;
2. Tawar menawar hukuman, dimana ketika hakim menyampaikan kepada terdakwa tentang hukuman yang akan dijatuhkan namun terdakwa mengajukan pengakuan bersalah, maka akan diringankan dibandingkan ia menolak untuk mengaku.³³

B. Negara yang menganut paham Eropa kontenental.

Sedangkan praktik *Plea Bargaining* yang terdapat di negara negara yang menganut paham Eropa Kontenental, diantaranya, Sbb:

1. Prancis.

Bahwa *plea bargaining* di Perancis diperkenalkan sejak tahun 2004, dan telah menuai berbagai argumentasi dan perdebatan karena dianggap dapat mencederai asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan juga hak untuk diadili pada peradilan yang adil dan wajar (*due process of law*). Wikipedia menjelaskan:³⁴

“Pengenalan bentuk terbatas permohonan tawar (*comparation sur reconnaissance préalable de culpabilité* atau CRPC, sering diringkas sebagai *plaider coupable*) pada tahun 2004 sangat kontroversial di Perancis. Dalam sistem ini, jaksa penuntut umum bisa mengusulkan kepada tersangka kejahatan yang hukumannya relatif kecil tidak melebihi satu tahun penjara, kesepakatan, jika diterima, harus diterima oleh hakim. Lawan, biasanya pengacara dan partai politik sayap kiri, berpendapat bahwa permohonan tawar akan sangat melanggar hak pembelaan, hak konstitusional lama dari praduga tak bersalah, hak-hak tersangka dalam tahanan polisi, dan hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil.”³⁵

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.* Hal. 6

³⁵ *Ibid.*

Robert Badinter mengemukakan resiko apabila *plea bargaining* di berlakukan di Perancis, yakni akan berbahaya apabila sistem ini akan dimanfaatkan oleh terdakwa untuk menghindari hukunya yang lebih berat. “Misalnya, Robert Badinter berpendapat bahwa permohonan tawar akan memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada jaksa penuntut umum dan akan mendorong terdakwa menerima hukuman hanya untuk menghindari risiko hukuman yang lebih besar di pengadilan, bahkan jika mereka tidak benar benar layak mendapatkannya. Hanya sebagian kecil kasus pidana diselesaikan dengan metode bahwa: pada tahun 2009, 77.500 keluar dari 673.700 atau 11,5 % dari keputusan oleh pengadilan pemasyarakatan”.³⁶

Stephen C. Thaman menyatakan: Di perancis, Penuntut umum akan membuat rekomendasi hukuman setelah adanya pengakuan bersalah terdakwa. Tujuan mempercepat peradilan menjadi lebih efisien juga dapat tercatat pada tahun 2009, sekitar 77.500 kasus (11,5%) selesai melalui *plea bargaining* dari keseluruhan 673.700 kasus.³⁷

2. Jerman.

Konsep *Plea Bargaining* di Jerman dikenal dengan istilah *Deal (Absprache)*. Adapun proses *Deal* dilakukan secara rahasia diluar proses peradilan. Dalam perkembangannya *Plea Bargaining (Deal)* dimasukan dalam *Code of Criminal Procedure* tahun 2009. Kemudian aturan tersebut di *Judicial Review* dan diputuskan bahwa pasal yang mengatur pelaksanaan *Plea Bargaining* dinyatakan konstitusional bersyarat dengan catatan apabila dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan maka pembentuk undang-undang dapat merubah atau menghilangkan proses *Plea Bargaining*. Tingginya penggunaan *Deal* di Jerman dikarenakan ketidakmampuan peradilan dalam menangani perkara yang banyak (tunggakan perkara) disamping juga banyaknya perkembangan aturan yang makin banyak dan juga kesulitan dalam suatu pembuktian perkara.³⁸

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ I Made Agus Mahendra Iswara. *Op.Cit.* Hal. 31.

Deal merupakan proses negoisasi antara penuntut umum dengan penasehat hukum serta melibatkan hakim dengan tujuan memberikan keringanan hukuman serta mengganti pasal dakwaan yang lebih rendah (oleh penuntut umum). Proses *Deal* dilakukan diluar proses peradilan secara rahasia.

Tujuan dilaksanakan proses ini adalah untuk mempermudah pembuktian. Pada tahun 1997 Mahkamah Agung Jerman memutuskan bahwa *Deal* dapat dilakukan dengan memberikan persyaratan tambahan yaitu : (1) Hakim boleh menurunkan hukuman namun apabila dalam proses pembuktian terdapat hal lain penurunan hukuman dapat tidak dilaksanakan; (2) Terdakwa wajib mengikut proses negoisasi (baik didalam maupun diluar) dan hasilnya dipublikasikan di depan pengadilan; (3) Terhadap perkara kesusilaan melibatkan partisipasi korban; (4) Pengadilan tidak boleh melakukan negoisasi yang membuat terdakwa kehilangan hak-haknya.³⁹

4. Tinjauan Tentang *Plea Bargaining* Dalam Asas-Asas Hukum Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

a. Definisi Asas Hukum

Secara etimologi asas berasal dari bahasa arab yakni *asasun* yang mengandung arti dasar, basis, dan pondasi. Jika dikaitkan dengan sistem berpikir maka asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar.⁴⁰ Dalam kamus ilmiah populer Asas adalah pokok, dasar, prinsip, fundamen.⁴¹ Sementara dalam pengertian lain, asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum.⁴²

Berpijak pada pengertian asas yang dirumuskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka terdapat tiga pengertian yang terkandung didalamnya, yakni (1) dasar, alas, pondamen, (2) suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir, (3) cita-cita yang menjadi dasar.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Rohidin, 2016, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia*, Lintang Rasi Aksara Books, Jogjakarta. Hal 37.

⁴¹ Agustin Risa, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap Dengan EYD dan Pembentukan Istilah Serta Akronim Bahasa Indonesia*, Penerbit Serba Jaya, Surabaya, Hal. 39

⁴² Kamus Hukum, Penerbit Citra Umbara, Bandung 2008. Hal. 31

Dalam memaknai asas hukum, beberapa pakar mengemukakan antaralain, Bellefroid mengartikan asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.⁴³ dengan demikian titik tekan Bellefroid bahwa asas hukum bertitik tolak dari adanya hukum positif yang dipengaruhi oleh waktu dan tempat.

Sementara Sudikno Mertokusumo mengemukakan, bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan konkrit, melainkan pikiran-pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang kongkrit yang terdapat dalam dan dilatarbelakangi setiap system hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif.⁴⁴

Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat pakar tersebut, penulis menyimpulkan dan merumuskan unsur-unsur asas hukum antaralain : (1) Suatu rumusan yang memuat hal-hal mendasar, pokok atau prinsipil, (2) menjadi dasar ada dan berlakunya suatu norma hukum, (3) bersifat umum.

b. Fungsi Asas Hukum

Secara prinsipil asas hukum menjadi suatu landasan lahirnya suatu peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu ia berisi pikiran dasar yang bersifat umum. Asas hukum memiliki fungsi yang tentunya berkontribusi pada penemuan dan perkembangan hukum positif, yang diantaranya: (1). Asas hukum berfungsi sebagai penyelesaian konflik di antara norma-norma hukum positif.⁴⁵ Misalnya konflik antara peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun horizontal, yang dimana terdapat beberapa Undang-Undang yang berlaku sama dan mengatur hal yang sama sebagai suatu hukum positif. Maka asas hukum akan tampil sesuai peruntukannya untuk memastikan

⁴³ Bellefroid, dalam Machmudin Dudu Duswara, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung, PT Refika Aditama, Hal 67-68

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Satau Pengantar*, Liberty, Cetakan Ke dua, Yogyakarta, Hal. 34

⁴⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019, *Selayang Pandang Asas Hukum/Kaidah Hukum, Ilmu Hukum dan Hukum Pidana*, Hal. 11, diakses dalam <https://aclc.kpk.go.id/> Pada 16 Agustus 2020.

mana Undang-Undang yang akan menjadi acuan. Itulah mengapa asas hukum juga disebut sebagai pengobat hukum (*Lagal remedies*).⁴⁶

Disamping itu, (2) asas hukum juga berfungsi menjadi suatu landasan yang melahirkan norma hukum, dengan kata lain “*asas hukum melahirkan norma hukum, norma hukum melahirkan aturan hukum*”.⁴⁷ Melalui asas hukum, setiap aparat penegak hukum dapat menciptakan suatu norma hukum yang baru, mengingat asas hukum adalah dasar atau cita-cita dasar hukum, sebagai suatu negara harus bertumpu pada dasar tujuan negara.

Pendapat lain juga menyatakan bahwa Asas-asas hukum berfungsi, antara lain, untuk menetapkan wilayah penerapan aturan hukum pada penafsiran atau penemuan hukum, sebagai kaidah kritis terhadap aturan hukum, kaidah penilai dalam menetapkan legitimitas aturan hukum, kaidah yang mempersatukan aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum, menjaga/memelihara konsistensi dan koherensi aturan-aturan hukum.⁴⁸

Akan tetapi selain itu, penulis juga berpandangan bahwa asas hukum dapat berfungsi sebagai dasar hukum bilamana dasar hukum tertulis tidak mampu mengatasi persoalan hukum yang terjadi, seperti kekosongan hukum, maupun konflik-konflik norma. Akan dalam praktiknya asas hukum kecenderungan disimpangi oleh Penegak hukum itu sendiri, karena pelanggaran atas asas tidak menimbulkan akibat hukum.

c. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Dalam hukum acara pidana terdapat beberapasa asas hukum yang wajib diterapkan oleh aparaturnegara, termasuk lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman. Diantaranya adalah:

1. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

⁴⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019, *Selayang Pandang Asas Hukum/Kaidah Hukum, Ilmu Hukum, dan Hukum Pidana*, Hal. 11, diakses dalam <https://aclc.kpk.go.id/> Pada 16 Agustus 2020.

⁴⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019, *Selayang Pandang Asas Hukum/Kaidah Hukum, Ilmu Hukum, dan Hukum Pidana*, Hal. 13, diakses dalam <https://aclc.kpk.go.id/> Pada 16 Agustus 2020.

⁴⁸ Susi Dwi Harianjti, 2014, *Bila Hukum Positif Bertentangan Dengan Asas Hukum*, <https://www.hukumonline.com/bila-hukum-positif-bertentangan-dengan-asas-hukum/>, PSKN FH Unpad, diakses Pada 16 Agustus 2020

Asas ini harus ditegakkan pada semua tingkat pemeriksaan dan sangat menyangkut pada sikap mental aparat penegak hukum. Pada ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP terdapat dua proses penting yakni : (1). Adanya peradilan yang bebas dari pengaruh apapun (*independent judiciary*), dan (2). Proses peradilan pidana harus dilakukan secara cepat dan sederhana (*speedy trial*).⁴⁹

Merujuk pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi salah satu asas yang tegas bagi pelaku penyelenggara kekuasaan kehakiman pada seluruh peradilan di Indonesia. Ketentuan Pasal 2 ayat 4 berbunyi “*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*”, yang dalam penjelasannya berbunyi: *Ayat (4) Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.*⁵⁰

Menurut pendapat Febby Mutiara Nelson asas Sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit. Semakin sedikit formalitas persidangan, maka semakin mudah dipahami dan mengurangi timbulnya penafsiran hukum.⁵¹ Asas Cepat menunjukan jalanya peradilan, semakin banyak formalitas akan menghambat pada jalanya peradilan dan lambanya penyelesaian perkara.⁵² Sementara Biaya Ringan adalah biaya yang rendah mungkin yang dipikul masyarakat pencari keadilan. Tentunya tidak menghilangkan ketelitian dan mencari kebenaran dan keadilan. Sebab biaya

⁴⁹ Kejaksaan Republik Indonesia, 2019, Modul Hukum Acara Pidana, Pelatihan dan Pembentukan Jaksa, Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta. Hal. 15

⁵⁰ Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal. 17-18

⁵¹ Febby Mutiara Nelson, *Op.Cit.* Hal. 306

⁵² *Ibid.*

yang tinggi akan memungkinkan orang tidak menuntut perkaranya di persidangan.⁵³

Proses peradilan yang cepat dan sederhana merupakan tuntutan yang logis dari setiap tersangka atau terdakwa, apalagi dirinya dalam tahanan. Dengan mengingat pada:

- ❖ Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa Surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. (Pasal 18 (2).
- ❖ Atas setiap waktu pengurangan kebebasan tersangka atau terdakwa harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya demi kepentingan penyelesaian perkaranya.
- ❖ Pasal 24 (3), Pasal 25 (3), Pasal 26 (3), Pasal 27 (3), Pasal 223 (3), Pasal 29 (5) “ tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi”.
- ❖ Pasal 29 (4) ”Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat 3 dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggungjawab”.
- ❖ Pasal 50 “Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum, dan kemudian segera pula diadili oleh pengadilan”.
- ❖ Pasal 52 “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.
- ❖ Pasal 102 : Penyelidik yang menerima laporan wajib segera melakukan...
- ❖ Pasal 107 : Ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada⁵⁴
- ❖ Pasal 110 : Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Kejaksaan Republik Indonesia, 2019, Modul Hukum Acara Pidana, Pelatihan dan Pembentukan Jaksa, Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta. Hal. 16

Sedangkan mengenai asas biaya ringan dapat kita lihat pada Surat edaran MA No. KMA/155/X/1881 tanggal 19 Oktober 1981 yaitu minimal Rp 500,00 dan maksimal Rp.10.000,00.⁵⁵

2. Asas *Equality Before The Law*.

Istilah *equality before the law* merupakan kalimat tafsiran bahasa inggris yang dimaknai dengan persamaan dihadapan hukum yang telah diakui masyarakat dunia melalui deklarasi universal hak asasi manusia oleh Perserikatan bangsa-bangsa.⁵⁶ Sejalan dengan ini indonesia yang menganut negara hukum menuangkan pokok fikiran mengenai persamaan dihadapan hukum dalam konstitusi negara undang-undang dasar 1945.

Sedangkan dalam proses penerapan hukum acara pidana persamaan dihadapan hukum dituangkan dalam Undang-Undang Kekusasaan Kehakiman Pasal 5 ayat 1 dengan frasa, "*pengadilan mengadili menurut hukum tanpa membedakan*" dan terdapat pula dalam KUHAP butir 3 a yang berbunyi: "*perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan*".⁵⁷

Dari bunyi pasal tersebut dapat dimaknai bahwa setiap seseorang dalam hal diduga melakukan tindak pidana dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan perbuatannya tanpa adanya perbedaan, seperti halnya dalam proses penyidikan yang tidak membedakan antara golongan pejabat, yang kaya dan masyarakat miskin berupa proses penyidikan dalam mendapatkan hak-haknya sebagai tersangka sesuai dengan ketentuan KUHAP Untuk tidak diperlakukan manusiawi berupa kekerasan maupun tindakan yang dapat menimbulkan rasa takut pada seseorang dalam proses penyidikan.

⁵⁵ Kejaksaan Republik Indonesia, 2019, Modul Hukum Acara Pidana, Pelatihan dan Pembentukan Jaksa, Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta. Hal. 17

⁵⁶ Kamus hukum online indonesia-indonesia law dictionary, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/equalitybeforethelaw> diakses pada tanggal 16 Agustus 2020

⁵⁷ Pasal 5 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 3 Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana

5. Relevansi *Plea Bargaining* dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam KUHAP

Merujuk pada pandangan Febby Mutiara Nelson Dalam bukunya yang berjudul memberikan argumentasi bahwa konsep *Plea Bargaining* sangat selaras atau relevan dengan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, yang salah satu bentuknya adalah penerapan pendekatan *Plea Bargaining* dalam kasus Tindak Pidana Korupsi sebagai upaya untuk mengembalikan keuangan negara.

Bagi penulis, *Plea Bargaining* dan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan dua hal yang berbeda akan tetapi sama-sama bermuara pada tercapainya keadilan dan kemanfaatan bagi warga masyarakat yang berhadapan dengan hukum maupun pemerintah itu sendiri, karena menekankan pada proses dan hasil yang bermanfaat bagi orang yang diperiksa, maupun bagi negara yang menyelenggarakan peradilan dalam kaitanya dengan keuangan.

Konsep peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan pada intinya adalah proses administrasi harus cepat, sederhana dan murah, yang ditujukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah dan warga negara. Kebutuhan pemerintah akan peradilan yang cepat adalah untuk mengurangi anggaran keuangan dalam penanganan perkara, sementara kebutuhan masyarakat adalah penyelesaian perkara yang cepat agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM yang tersangka/terdakwa karena proses yang panjang dan berbelit-belit.

Salah satu pandangan yang dapat dijadikan acuan bahwa *Plea Bargaining* relevan dengan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yakni terletak pada penelitiannya tentang pengembalian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi dengan pendekatan *Plea Bargaining*, yang dapat diterapkan di Indonesia sebab prosesnya lebih singkat, misalnya dengan “*non-conviction based asset recovery*”, maka biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian perkara akan lebih ringan. Akan tetapi perlu penekanan

pada “*speedy and simpel trial*” peradilan cepat dan sederhana, dengan tanpa mengurangi ketelitian dan kecermatan dalam penyelesaian kasus korupsi.⁵⁸

6. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Tindak Pidana.

1. Konsep Pembuktian dalam pasal 183 KUHAP.

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang negatif (*Negatif wettelijk*). Hal ini tercantum dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadinya dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*”.⁵⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut, nyatalah bahwa pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang disebutkan dalam undang undang disertai keyakinan hakim atas alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, yang terdiri dari:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk; dan
- 5) Keterangan terdakwa.

Disamping itu kitab Undang-undang hukum Acara Pidana juga menganut minimum pembuktian (*minimum bewijs*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 tersebut. Minimum pembuktian berarti dalam memutuskan suatu perkara pidana hakim harus memutuskan berdasarkan sejumlah alat bukti. KUHAP memberikan batasan minimal penggunaan alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti disertai oleh keyakinan hakim. Tahap pemeriksaan perkara pidana dipengadilan ini dilakukan setelah

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Lihat Pasal 183 KUHAP

tahap pemeriksaan pendahuluan selesai. Pemeriksaan ini dilandaskan pada *System Accusatoir*.⁶⁰

Sebagaimana telah disinggung diatas, bahwa selain Pasal 183 yang mengatur tentang pembuktian, juga terdapat dalam Pasal 184 KUHAP mengatur secara eksplisit jenis alat bukti yang menjadi acuan pembuktian dalam proses peradilan pidana di Indonesia, yakni : 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan Ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, dan 5. Keterangan terdakwa.⁶¹

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat bukti yang sah menurut undang-undang (KUHP) yang dapat dipergunakan untuk pembuktian, hal ini berarti bahwa diluar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

Adapun yang dimaksud dengan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi.

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

b. Keterangan Ahli.

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁶²

⁶⁰ Nia Maryam, 2017, *Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Dan Plea Bargaining System*, Penulisan Hukum, FH-UMM, Malang. Hal 49-50.

⁶¹ J. Andi Hamzah, 2018, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua Belas, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 259.

⁶² *Ibid.* Hal. 273-274

c. Surat.

Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya; surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.⁶³

d. Petunjuk.

Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan Terdakwa.

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Selain alat bukti, dalam KUHAP juga mengenal adanya Barang Bukti walau tidak secara jelas yang dimaksud dengan barang bukti itu apa. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai

⁶³ *Ibid.* Hal. 275

hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.⁶⁴

Bila kita melihat pada Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

7. Tinjauan Umum Tentang Pengakuan Bersalah Terdakwa Dalam Pembuktian Tindak Pidana.

Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan. Pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan oleh hakim tidak perlu lagi.⁶⁵

Pengakuan di muka hakim di persidangan memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya, baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus.⁶⁶

Subekti melanjutkan, bahwa: Pengakuan dalam pembuktian peradilan perdata, pada dasarnya lebih mengutamakan kebenaran formil, sehingga apabila seseorang telah mengakui dimuka pengadilan atas dalil yang diajukan oleh lawan, maka hakim tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut. Pengakuan dalam konteks ini merupakan bukti

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006. Hal. 181.

⁶⁶ Subekti, *Hukum Pembuktian*, dalam Aby Maulana, *Op.cit.* Hal 3.

mengikat dan sempurna, sehingga hakim harus mengabulkan segala tuntutan atas gugatan yang didasarkan dalil-dalil tersebut.⁶⁷

Pengaturan konsep pengakuan bersalah dalam jalur khusus dimaksud, tertuang dalam Pasal 199 RUU KUHP, yang bunyinya:⁶⁸

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
- (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
- (3) Hakim wajib:
 - a. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan;
 - c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
 - d. Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
 - e. Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.⁶⁹

Dalam ketentuan di atas, terdapat terobosan yang coba dikembangkan dalam peradilan pidana di Indonesia. Inilah yang menjadi pijakan bahwa, pembaharuan dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sudah

⁶⁷ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, dalam Aby Maulana, *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

menjadi tuntutan yang harus segera direalisasikan untuk memenuhi keadilan di tengah masyarakat.⁷⁰

8. Peran dan Fungsi Lembaga Pengawas Upaya Paksa Dalam Proses Penyidikan dan Penuntutan.

a. Praperadilan Dalam KUHAP

Praperadilan adalah lembaga baru yang lahir bersamaan dengan kelahiran KUHAP (UU NO 8 Tahun 1981), akan tetapi Praperadilan bukan merupakan lembaga yang mandiri dan berdiri terpisah dari pengadilan negeri, sebab berdasarkan rumusan Pasal 1 Juncto Pasal 77 KUHAP dapat diartikan bahwa Praperadilan hanya wewenang tambahan yang diberikan undang-undangan kepada Pengadilan Negeri.⁷¹

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:⁷²

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
3. *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuaanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*⁷³

Pengadilan Negeri (PN) sebagai peradilan umum merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus atau mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 2 jo pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986).

⁷⁰ *Ibid* hal 4.

⁷¹ HMA. Kuffal, *Op.cit.* Hal. 271

⁷² Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

⁷³ Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Disamping tugas dan wewenang pokoknya mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata kepada pengadilan negeri oleh KUHAP diberikan wewenang tambahan berupa praperadilan yaitu wewenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan/kasus yang terjadi dalam penggunaan wewenang upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum sebagaimana diatur dalam KUHAP BAB X Bagian Kesatu Pasal 77 s/d 83 dan BAB XII Bagian Kesatu dan Kedua Pasal 95, 96 dan 97.⁷⁴

Wewenang pengadilan tentang praperadilan yang diberikan kepada pengadilan negeri adalah wewenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (Pasal 77 huruf a KUHAP);
3. Sah atau tidaknya pemasukan rumah, penggeledahan dan atau penyitaan {Pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 95 ayat (2) KUHAP};
4. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau pada tingkat penuntutan (pasal 77 huruf b KUHAP);⁷⁵

Akan tetapi objek Praperadilan sebagaimana diatas, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek Praperadilan. Berdasarkan putusan ini, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan yang sebelumnya tidak termasuk objek yang dapat dipraperadilan, semenjak putusan dibacakan, sah sebagai objek praperadilan. Putusan ini telah memperluas objek Praperadilan yang sebelumnya hanya pada penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.⁷⁶

Tujuan dan fungsi utama Praperadilan dalam upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tersebut dapat terlaksana

⁷⁴ *Ibid.* Hal. 272

⁷⁵ *Ibid.* Hal.272

⁷⁶ Lihat Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Putusan No 21/PUU-XII/2014, Hal. 100-106

sebagaimana yang dicita-citakan, maka didalam KUHAP diatur lembaga baru dengan nama praperadilan sebagai pemberian wewenang tambahan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain) yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum.⁷⁷

Maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan praperadilan berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kalimat yang lebih tegas dapat dikatakan bahwa diadakannya praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa.

Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan yaitu:

1. Tersangka, keluarga atau kuasanya
Permohonan pemeriksaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (pasal 79 KUHAP);
2. Penyidik, penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan
Permohonan pemeriksaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, dapat diajukan oleh penuntut umum dan atau pihak ketiga yang berkepentingan. Dan permohonan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan dapat diajukan oleh penyidik dan atau pihak ketiga yang berkepentingan. Permohonan tersebut diajukan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (pasal 80 KUHAP).⁷⁸

9. Konsep *Plea Bargaining* Dalam Perspektif Asas Keadilan

⁷⁷ *Ibid.* Hal.273

⁷⁸ *Ibid.* Hal.276

G. HASIL PENELITIAN

1. Prospek Penerapan Konsep *Plea Bargaining* Dalam Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Dalam hukum positif di Indonesia *Plea Bargaining* tidak dikenal. Jika dalam praktek terjadi negosiasi antara jaksa dengan tersangka, maka hal tersebut dianggap sebagai kejahatan. Namun, jika mencermati pasal 202 KUHP sesungguhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah diterapkan sistem yang mirip dengan *Plea Bargaining*. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, dalam ketentuan mengenai sidang acara pemeriksaan singkat, perkara yang diperiksa adalah perkara yang sifat pembuktianya “mudah”. Pengertian mudah disini adalah adanya pengakuan dari tersangka pada saat penyidikan.⁷⁹

Konsep tentang saksi pelaku yang bekerjasama dengan penyidik/penuntut umum, atau disebut dengan justice collaborator di setiap Negara memiliki sebutan yang berbeda-beda. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime*, saksi dapat diklasifikasi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu justice collaborator, saksi korban, dan saksi jenis lainnya. *Justice collaborator* telah dikenal di beberapa Negara dengan penyebutan yang berbeda-beda seperti *cooperating witnesses* (saksi yang bekerjasama), *crown witnesses* (saksi mahkota), *witnesses collaborators* (saksi kolaborator), *justice collaborator*, *state witnesses* (saksi Negara). Dalam statusnya sebagai saksi *justice collaborator* termasuk golongan utama dalam perlindungan saksi.⁸⁰

Konsep *Plea Bargaining* sesungguhnya telah banyak mewarnai sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam sistem peradilan Pidana di Indonesia, embrio penerapan konsep *Plea Bargaining* telah ada dalam beberapa ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

1. United Nations Convention Against Corruption/UNCAC (Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 tentang konvensi PBB anti korupsi).

⁷⁹ M Yahya Harap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, kasasi dan peninjauan kembali). Edisi ke 2 Jakarta; Sinar Grafika, 2010, Hal 396

⁸⁰ I Gst Agung Kadek Suryananta, 2015, “Kebijakan Formulasi Peringatan Pidana Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, Jurnal Hukum Brawijaya, Malang. Hal 7.

Instrumen ini merupakan dasar hukum yang melatarbelakangi lahirnya ide tentang Justice Collaborator dalam peradilan pidana. Pengaturan berkaitan dengan Justice Collaborator dalam peradilan pidana yang diatur dalam pasal 37 sebagai berikut : Ayat (2) : setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini. Ayat (3) : setiap negara wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan dalam konvensi ini.⁸¹

Sejak Presiden Republik Indonesia menandatangani persetujuan pengikatan pada konvensi ini tahun 2006, sampai saat ini sudah 80% aturan yang tertuang dalam UNCAC diterapkan di Indonesia, sehingga upaya pemberantasan korupsi yang melibatkan saksi pelaku dapat berjalan maksimal. Tujuan Utama UNCAC adalah meningkatkan dan memperkuat pencegahan dan penindakan korupsi agar lebih efektif dan efisien juga meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dan bantuan teknis untuk pencegahan dan penindakan korupsi dan meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan manajemen pemerintahan.⁸²

2. United nations convention against transnasional organized crime/ UNCATOC (Undang-undang nomor 5 tahun 2009 tentang konvensi PBB anti kejahatan transnasional terorganisir).

Tujuan dari dibuatnya konvensi ini oleh negara-negara di dunia, agar terdapat kerjasama antar negara. Karna kejahatan transnasional terorganisir dapat mengancam kehidupan ekonomi, sosial, politik, keamanan dan perdamaian dunia. Demikian halnya dengan konvensi PBB anti korupsi, di

⁸¹ United nations Convention against corruption (UNCAC) pasal 37 ayat 2 dan 3 hal 27. diakses dalam www.unodc.org, pada 5 Oktober 2020

⁸² Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi, River Yohanes Manalu, Jurnal Lex Crimen, Vol. IV, No.1/2015, diakses dalam www.ejournal.unsrat.ac.id , pada tanggal 5 Oktober 2020

dalam konvensi ini juga memberikan ide pengaturan berkaitan dengan Justice Collaborator dalam peradilan pidana yakni diatur dalam pasal 26 sebagai berikut : Ayat (2) : Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, dalam keadaan yang tepat, pengurangan hukuman atas terduduk yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh konvensi ini. Ayat (3) : Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, pemberian kekebalan atas penuntutan terhadap seseorang yang memberikan kerjasama yang berarti di dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh konvensi ini.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Konsep *plea bargaining* diadopsi dalam Undang-undang Perlindungan saksi dan korban dalam bentuk ketentuan pasal mengenai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*). Dalam ketentuan Pasal 10 A disebutkan bahwa:

“Ayat (1): Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan”

Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan:

“Penghargaan kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa:

- a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
- b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana;

Definisi keringanan penjatuhan pidana disebutkan dalam penjelasan Pasal 10 A Ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu:

“yang dimaksud dengan keringanan penjatuhan pidana mencakup pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana yang paling ringan diantara terdakwa lain”.⁸³

⁸³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, diakses dalam www.bphn.go.id, pada 1 Oktober 2020

Istilah saksi pelaku dalam ketentuan pasal 10 A sebagaimana tersebut di atas, bila merujuk pada ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, didefinisikan sebagai *“tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana untuk kasus yang sama”*.

Selanjutnya dalam bagian lain pada penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak dijelaskan mengenai definisi *“kesaksian”* saksi pelaku. Namun demikian, secara umum dapat dipahami bahwa *“kesaksian”* saksi pelaku sangat identik dengan *“Keterangan Tersangka”* atau *“Keterangan Terdakwa”*. Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mendefinisikan terdakwa adalah *“apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”*. Dalam konteks pemeriksaan Penyidikan, maka keterangan tersangka adalah apa yang tersangka sampaikan di hadapan penyidik yang kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Berdasarkan uraian diatas, kesaksian pelaku yang disebut dalam Pasal 10 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sangat identik dengan pengakuan tersangka atas tindak pidana yang ia lakukan bersama-sama dengan orang lain, yang dengan pengakuan tersebut, tersangka memperoleh penghargaan berupa keringanan hukuman;

Ketentuan mengenai *justice collaborator*, dikuatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011, Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut mengatur mengenai

pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*), yaitu sebagai berikut⁸⁴:

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
- b. Jaksa penuntut umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau Penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut disebutkan pula bahwa atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerja sama, hakim dapat menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut :

1. Menjatuhkan Pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau:
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Meskipun tidak sepenuhnya menerapkan konsep *plea bargaining* sebagaimana bentuk aslinya, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011, Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, terkandung embrio semangat penyelesaian perkara pidana melalui *plea bargaining*,

⁸⁴Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011, Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, diakses dalam <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/content/2011/10/SEMA-No.04-2011.pdf>, pada tanggal 1 Oktober 2020

yaitu dengan mengakomodir pengakuan terdakwa sebagai dasar bagi hakim untuk menentukan penjatuan pidana yang lebih ringan.

Meski telah mengadopsi konsep *plea bargaining*, terdapat perbedaan dalam pemberlakuan kebijakan mengenai *Justice collaborator*. Perbedaan yang paling signifikan adalah dalam konsep *Justice collaborator*, tidak ada proses kesepakatan (*agreemenet*) mengenai berat ringan tuntutan, antara tersangka dengan penuntut umum sebagai kompensasi dari pengakuan yang ia berikan.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Secara prinsipil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengedepankan pendekatan *restorative justice*, yang diimplementasikan dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan *restorative justice* akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (*in orderto achieve reparation*).⁸⁵

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, yang meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;

⁸⁵ Ivo Aertsen, et, al, *Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment*, (Journal TEMIDA, 2011). <https://www.researchgate.net/>, diakses pada 18 Juli 2020

- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Meskipun tidak secara tegas menerapkan prinsip-prinsip *Plea Bargaining*, mekanisme Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki benang merah yang sama dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep *Plea Bargaining*, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan keadilan restorative, yang bertujuan untuk mencapai sistem peradilan yang efektif dan berkeadilan baik bagi pelaku tindak pidana, maupun bagi korban.

5. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pengaturan gagasan jalur khusus diatur dalam pasal 199 RUU KUHAP BAB XIII bagian keenam yang diberi namun jalur khusus, diatur mengenai keterangan terdakwa dalam pelaksanaan persidangan yang berbeda dengan tahap pembuktian pada umumnya. Pada jalur khusus ini mengakomodir pengakuan terdakwa dalam persidangan dan pengakuan tersebut diberikan pada tahap pembacaan surat dakwaan. Pengakuan yang diberikan oleh terdakwa mengenai perbuatan yang ia lakukan terbatas kepada perbuatan yang ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun penjara. 124 Apabila terdakwa mengakui perbuatannya maka penuntut umum melimpahkan perkara ke siding acara pemeriksaan singkat dan pengakuan tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan juga penuntut umum. Ketentuan jalur khusus ini diatur dalam pasal 199 RUU KUHAP bunyi pasal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.

2. Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
3. Hakim wajib:
 - a. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan.
 - c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela. (4)
4. Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
5. Dikecualikan dari pasal 189 ayat (5), penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi $\frac{2}{3}$ dari maksimum 125 pidana tindakan pidana yang didakwakan. Jadi, dalam hal terdakwa mengakui perbuatannya maka, ia berhak untuk mendapatkan maksimum pemidanaan yang lebih rendah dari ancaman pidana seharusnya. Ketentuan mengenai pengurangan pemidanaan juga dibatasi dengan ketentuan pasal 198 ayat (5) RUU KUHAP yang mengatur mengenai ancaman pidana maksimal untuk tindak pidana yang disidangkan dalam acara pemeriksaan singkat. Pasal 198 ayat (5) RUU KUHAP yang berbunyi: Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun. Pengaturan baru yang tercantum dalam RUU KUHAP di atas beberapa diantaranya merupakan pengenyampingan dari ketentuan yang ada pada UndangUndang No. 8 Tahun 1981. Ketentuan mengenai pengakuan terdakwa dalam jalur khusus. Seperti yang telah dijabarkan di atas, ketentuan mengenai pengakuan terdakwa yang dapat menyelesaikan sebuah perkara dengan cepat bertentangan dengan pengaturan mengenai keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya (pasal 189 ayat (4)). Secara substansial terdapat pengecualian baru terhadap pasal 198 ayat (4)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 melalui jalur khusus dalam RUU KUHAP, yang berarti keterangan terdakwa saja sudah cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepadanya. Pengakuan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya juga bertentangan dengan haknya untuk diam (*right to remain silence*) dan tidak mengkriminalisasikan dirinya sendiri (*non self incrimination*). Dalam hal terdakwa mengakui perbuatannya maka perkara dapat dilimpahkan ke 126 acara pemeriksaan singkat. Acara pemeriksaan singkat pada RUU KUHAP sama dengan pengaturan pada KUHAP yang berlaku saat ini. Meskipun pada dasarnya jalur khusus ini juga dapat dikecualikan dalam hal hakim tidak menyakini pengakuan yang diberikan terdakwa. pengakuan terdakwa yang dilakukan dengan tanpa paksaan dan telah diyakini kebenarannya oleh hakim, pemeriksaannya dilanjutkan kepada acara pemeriksaan singkat (pasal 198 RUU KUHAP).

Diadopsinya konsep dasar *plea bargaing system* dalam RUU KUHAP, tidak serta merta merubah seluruh tatanan sistem peradilan pidana yang ada saat ini, 131 melainkan akan memberikan ruang tersendiri dalam peradilan pidana, khususnya menyelesaikan perkara tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara dengan efisien dan cepat, serta didukung dengan adanya pengakuan bersalah terdakwa sebagai dasar hakim memperoleh keyakinan dalam memutus perkara. Rumusan jalur khusus dalam RUU KUHAP masih berorientasi pada terdakwa (*of fender centered*) dan hanya menguntungkan bagi pihak terdakwa saja, karena apabila seorang terdakwa telah mengaku bersalah di muka sidang dan hakim menerima pengakuan tersebut, maka ia berhak memperoleh peringanan pidana, lalu hak korban menjadi tidak diperhatikan. Hal ini berbeda dengan *plea bargaining* yang diterapkan di Polandia dan Georgia, dimana dalam menentukan dapat diterima atau ditolaknya suatu pengakuan bersalah, harus melibatkan korban secara langsung, bahkan korban dapat meminta penuntut umum untuk melakukan penuntutan agar terdakwa

membayarkan ganti kerugian atas hak-hak yang terganggu akibat tindak pidana.

2. Peran Penasihat Hukum Agar Penerapan Metode *Plea Bargaining* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dapat Memenuhi Aspek Keadilan, Baik Bagi Pelaku Tindak Pidana Maupun Bagi Korban.

Peran advokat ada pada setiap proses dalam sistem peradilan pidana. Dalam KUHAP, peran seorang penasehat hukum telah ada sejak proses penyelidikan sampai dengan proses rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Advokat sebagai seorang penasihat (sering ditulis: penasehat) hukum berperan untuk memastikan bahwa hak-hak seorang tersangka, terdakwa dan terpidana tidak dilanggar. Advokat bertindak sebagai penyeimbang terhadap upaya paksa yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum. Peran advokat ini menjadi penting. Ketiadaan seorang penasehat hukum dalam proses peradilan pidana memungkinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang berpengaruh terhadap hasil putusan pengadilan. Oleh karena itu, seorang penasihat hukum bukan hanya perlu sekedar hadir tetapi juga harus memiliki kompetensi untuk membela hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dengan benar.

Legitimasi peran dan fungsi Advokat dalam menegakkan hukum dan keadilan, secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dalam Pasal 5 disebutkan (1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Fungsi dan peran Advokat yang demikian, dipertegas pula dalam ketentuan mengenai Kode Etik Advokat Indonesia, pada bab kepribadian Advokat, Pasal 3 huruf C, yaitu:

“Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.”

Selanjutnya pada Pasal 8 huruf a bab yang sama disebutkan:

“Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam

melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik ini.”

Salah satu peran penting Penasihat hukum adalah menjelaskan kepada klien mengenai tahapan *Plea Bargaining*, konsekuensi hukum, serta memberikan pendapat hukum kepada tersangka mengenai peluang terbaik penyelesaian perkara pidana yang melibatkan klien, apakah melalui *Plea agreement* ataupun dengan penyelesaian perkara melalui pemeriksaan dengan prosedur lengkap di persidangan, serta memastikan proses pelaksanaan *Plea Bargaining* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta berpihak pada tegaknya hukum dan keadilan.

H. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa untuk memenuhi tuntutan membangun peradilan yang efektif, penerapan konsep *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Terlepas dari telah masuknya konsep *Plea Bargaining* dalam Rancangan KUHP, Sistem hukum di Indonesia memiliki peluang untuk mengadopsi konsep *Plea Bargaining* ke dalam sistem peradilan pidana, hanya saja diperlukan penyesuaian antara konsep *Plea bargaining* dengan sistem Peradilan Pidana yang berlaku di Indonesia yang menganut sistem civil law yang memberlakukan batas minimum pembuktian.

Penyesuaian tersebut dibutuhkan karena tidak mungkin menerapkan konsep *Plea Bargaining* secara utuh karena akan merubah keseluruhan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia;

2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dengan adanya penelitian hukum ini, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Konsep *Plea Bargaining* hanya diterapkan terhadap tindak pidana ringan atau yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 7 tahun;

2. *Plea Bargaining* diterapkan dengan tambahan syarat tertentu, yaitu:
 - Adanya kesepakatan perdamaian dengan korban/pelapor;
 - Pengembalian kerugian kepada korban atau kepada Negara dalam tindak pidana tertentu, atau pemulihan barang pada keadaan semula
3. *Plea Bargaining* dilaksanakan dengan pengawasan lintas komponen dalam sistem peradilan pidana;
4. Permohonan dilaksanakannya *Plea Bargaining* harus diketahui oleh Korban/Pelapor.
5. Perlu dilakukan pembaruan pada sistem peradilan di Indonesia khususnya terkait dengan asas batas minimum pembuktian (Pasal 183 KUHAP). Asas batas minimum pembuktian tidak memungkinkan lagi diberlakukan secara kaku, karena dengan penerapan konsep *Plea Bargaining*, hanya dengan pengakuan tersangka, maka secara materiil suatu tindak pidana telah terbukti, meski tanpa melewati proses pemeriksaan alat bukti lain dipersidangan. Dengan demikian eksistensi dan kekuatan pembuktian keterangan terdakwa semakin kuat yang secara otomatis merubah ketentuan pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, dengan penerapan konsep *Plea Bargaining* secara otomatis hakim terikat dengan keterangan terdakwa dalam posisi sebagai satu-satunya alat bukti yang sah.

Daftar Pustaka

Buku:

- Lilik Mulyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. CV. Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 112
- Ali Masyhar, 2008, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudy, 2001, *Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)*, Rajawali pers, Jakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Febby Mutiara Nelson, 2020, *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika Cetaka Pertama, Jakarta
- Rohidin, 2016, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia*, Lintang Rasi Aksara Books, Jogjakarta.
- Agustin Risa, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap Dengan EYD dan Pembentukan Istilah Serta Akronim Bahasa Indonesia*, Penerbit Serba Jaya, Surabaya
- Bellefroid, dalam Machmudin Dudu Duswara, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung, PT Refika Aditama
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Cetakan Ke dua, Yogyakarta
- Nia Maryam, 2017, *Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Dan Plea Bargaining System*, Penulisan Hukum, FH-UMM, Malang

J.Andi Hamzah, 2018, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua Belas, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

M Yahya Harap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, kasasi dan peninjauan kembali). Edisi ke 2 Jakarta; Sinar Grafika, 2010, Hal 396

Jurnal:

Choky Risda Ramadhan et- all, *Konsep dan Penerapan Plea Bargaining di Beberapa Negara*, dalam I Made Agus Mahendra Iswara, 2017, *Penguatan Kejaksaaan Dalam Penanganan Perkara Pidana Melalui Plea Bargaining*, Jurnal Advokasi, Universitas Mahasaraswati, Denpasar

Nella Octaviany Siregar, 2019, *Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Jurnal Wajah Hukum, Volume 3, ISSB 2598-604X (online).

Aby Maulana, 2014, *Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada "Jalur Khusus" Rujukan Kuhaip Dan Perbandingan Dengan Praktek Plea Bargaining Di Beberapa Negara*, Jurnal Hukum Staatsrecht Volume 1 No.1 oktober 2014.

I Gst Agung Kadek Suryananta, 2015, "Kebijakan Formulasi Peringatan Pidana Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", Jurnal Hukum Brawijaya, Malang. Hal 7.

Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi, River Yohanes Manalu, Jurnal Lex Crimen, Vol. IV, No.1/2015, diakses dalam www.ejournal.unsrat.ac.id, pada tanggal 5 Oktober 2020

Peraturan Perundang-Undangan:

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor: M.01PW.07.03, Th. 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Naskah Akademik RUU KUHAP Versi 19 Desember 2012

Kejaksanaan Republik Indonesia, 2019, Modul Hukum Acara Pidana, Pelatihan dan Pembentukan Jaksa, Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 3 Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana

Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Putusan No 21/PUU-XII/2014, Hal. 100-106

United nations Convention against corruption (UNCAC) diakses dalam www.unodc.org, pada 5 Oktober 2020

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, diakses dalam www.bphn.go.id, pada 1 Oktober 2020

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011, Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang bekerjasama (*Justice Collabolators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, diakses dalam <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/content/2011/10/SEMA-No.04-2011.pdf>, pada tanggal 1 Oktober 2020

Internet:

Chairul Huda, Penerapan Mekanisme *Small Claim Court*, Dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana), diakses pada www.bphn.go.id pada 19 Oktober 2019

LBH Jakarta dan MaPPI FH UI, Prapenuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, Puluhan Ribu Perkara Hilang, Penelitian Pelaksanaan Mekanisme Prapenuntutan Di Indonesia Sepanjang Tahun 2012 – 2014, berdasarkan data yang diakses pada World Justice Project Rule Of Law Index, <http://data.worldjusticeproject.org/#/group/IDN>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2019

Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, Statistik Data Perkara Mahkamah Agung, diakses pada leip.or.id/statistik-data-perkara-mahkamah-agung/, pada tanggal 19 Oktober 2019

Apri Listiyanto, Pembaharuan Sistem Hukum Acara Pidana, diakses pada https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/, tanggal 25 Oktober 2019

Aby Mulana, Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP Dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining Di Beberapa Negara, diakses dari journal.uinjkt.ac.id, pada 18 Juli 2019

Carolyn E. Damarest, dikutip dalam Dimas Prasidi, *Plea Bargaining*, sebuah jalan permisif bagi keadilan, artikel, www.scholarship.law.berkeley.edu

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019, *Selayang Pandang Asas Hukum/Kaidah Hukum, Ilmu Hukum dan Hukum Pidana*, Hal. 11, diakses dalam <https://aclc.kpk.go.id/>

Susi Dwi Harianjti, 2014, *Bila Hukum Positif Bertentangan Dengan Asas Hukum*, <https://www.hukumonline.com/bila-hukum-positif-bertentangan-dengan-asas-hukum/>, PSKN FH Unpad, diakses Pada 16 Agustus 2020

